

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

Muslih Faozanudin dan Lilis Sri Sulistiani, Bambang Tri Harsanto, Ike Wanusmawatie, Sukarso, Niken Paramarti Dasuki, Shadu Satwika Wijaya, Hikmah Nuraini, Wahyuningrat, Dwiyanto Indiahono, Simin, Guntur Gunarto, Andi Antono, Sendy Noviko, Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, Dyah Retna Puspita, Tobirin, Safrida, Slamet Rosyadi, Nila Safrida, Delly Maulana, Abdul Rohman, Darmanto Sahat Satyawan, Mulyani Mudis Taruna

Editor: **Muslih Faozanudin & Tobirin**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

Penulis: Muslih Faozanudin dan Lilis Sri Sulistiani,
Bambang Tri Harsanto, Ike Wanusmawatie, Sukarso,
Niken Paramarti Dasuki, Shadu Satwika Wijaya, Hikmah Nuraini,
Wahyuningrat, Dwiyanto Indiahono, Simin, Guntur Gunarto, Andi
Antono, Sendy Noviko, Denok Kurniasih,
Paulus Israwan Setyoko, Dyah Retna Puspita, Tobirin, Safrida, Slamet
Rosyadi, Nila Safrida, Delly Maulana, Abdul Rohman, Darmanto Sahat
Satyawan, Mulyani Mudis Taruna

Editor: Muslih Faozanudin & Tobirin

Sampul & tata letak: Tim Desainer SIP Publishing



Diterbitkan Oleh:

SIP Publishing (Anggota IKAPI)

Jl. Curug Cipendok Km 1. Kalisari Cilongok. Kab. Banyumas. Jawa
Tengah

Customer Service:

+62 895-0894-3674 | +62 895-3846-52297 |

+62 896-7732-8203 | +62 898-8240-712

Fanspage: Satria Indra Prasta-SIP Publishing

Twitter: @SIPPublishing | Instagram: @sippublishing

E-mail: sippublishing@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku tanpa izin
penerbit dan penulis

Cetakan pertama, Desember 2022

15,5x23,5 cm | xxii + 432 hlm

ISBN 978-623-337-803-1

Ucapan Terima Kasih

Penulisan buku ini difasilitasi oleh anggaran pengembangan bahan pembelajaran yang disediakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. Oleh karena itu dengan terbitnya buku ini, kami sampaikan terimakasih kepada Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan perhatian yang besar bagi pengembangan kinerja dosen Jurusan Administrasi Publik. Terimakasih juga disampaikan kepada Ketua Jurusan Administrasi Publik yang telah ikut memfasilitasi mengusulkan program penulisan buku ini. semoga buku ini bermanfaat. Penghargaan juga diberikan kepada semua penulis yang telah menyumbangkan gagasan dalam bentuk tulisan sehingga dapat terwujud buku ini.

Pengantar Editor

Pemberdayaan telah menjadi bagian diskursus global yang populer dan menjadi bagian dari strategi pembangunan, khususnya dalam dimensi untuk pengembangan kapasitas, dan pembebasan dari cengkeraman ketertundukan terhadap kekuasaan. Konsep pemberdayaan memiliki makna yang luas hampir sama dengan konsep pembangunan yang banyak digunakan untuk menggambarkan proses menuju suatu kondisi yang lebih baik. Ketika konsep ‘pemberdayaan’ disandingkan dengan konsep ‘komunitas’ atau ‘masyarakat’, maka akan bermakna sebagai upaya untuk menjadikan masyarakat lebih maju, lebih bertenaga sehingga mampu bangkit untuk melauai kekuatan sendiri.

Buku yang dihadapkan para pembaca ini merupakan kumpulan gagasan dan hasil penelitian dari beberapa penulis yang mengelaborasi tentang pemberdayaan. Sehingga buku ini memiliki matra yang cukup luas. Namun demikian disadari bahwa tulisan ini belum semuanya dapat merangkum cakupan makna pemberdayaan yang secara konseptual dan praktis yang ada. Semoga buku ini dapat memberikan informasi tentang pemberdayaan dari beberapa perspektif.

Buku ini secara terstruktur dengan bahasan sebagai berikut, Diawali dengan pembasahan tentang diskursus pemberdayaan dan pembangunan yang tersaji dalam Bab I. Pada Bab II diawali dengan menjelaskan mengenai pengertian

pemberdayaan masyarakat, teori pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat dan aktor-aktor yang terlibat. Metode untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, indikator untuk mengukur keberhasilan dari penerapan konsep pemberdayaan masyarakat serta beberapa contoh program pembangunan sebagai bentuk implementasi dari penerapan paradigma pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan yang bersifat bottom up diyakini dapat mengurangi kesalahan penerapan model pembangunan yang bersifat top-down yang hanya menghasilkan pertumbuhan tetapi mengabaikan adanya pemerataan. Model pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif pembangunan dipilih karena dalam implementasinya memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Konsep pemberdayaan masyarakat bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pada Bab III, mengelaborasi tentang pemberdayaan dari pendekatan berpikir sistem yang menawarkan cara pandang komprehensif dalam melihat permasalahan dalam rangka mempercepat kinerja sistem pemberdayaan. Penulis juga mengidentifikasi dan mendeskripsikan elemen dan perilaku atau dinamika sistem untuk merubah sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa

dalam sistem pemberdayaan masyarakat desa terdapat sembilan (9) elemen yaitu sub sistem aktifitas pemberdayaan masyarakat, sub sistem kemandirian, sub sistem kemiskinan, sub sistem dukungan pemdes; sub sistem dukungan pemerintah daerah; sub sistem dukungan pemerintah pusat; sub sistem dukungan masyarakat desa; sub sistem peran pihak ketiga; sub sistem kearifan lokal dan dukungan tokoh informal. Selanjutnya untuk mengubah keadaan dari belum mandiri menjadi optimal kemandiriannya maka dibutuhkan penelitian lebih dalam dan berkelanjutan untuk menemukan pengungkitnya (leverage) sesuai dengan tahapan dalam metode system dynamic. Analisis dan pembasahan tentang konsep pemberdayaan dipertajam lagi pada Bab IV dengan mencoba untuk rekonseptualisasi konsep pemberdayaan. Hasil Kajian penulis menyimpulkan bahwa penggunaan konsep pemberdayaan masyarakat selama ini relatif tidak komprehensif dan bahkan terjebak pada arus kapitalistik yang sempit. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya definisi ulang pemahaman dan upaya pemberdayaan masyarakat tersebut yang tidak vertikal dan eksternal.

Pada Bab V membahas tentang kaitan antara kebijakan publik dengan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan dapat dipahami melalui 2 model yang utama, yaitu model elite dan kelompok. Model elit mengasumsikan bahwa *policy as elite preference*, sedangkan, model kelompok mengasumsikan bahwa *policy as equilibrium in the group struggle*. Dalam proses

kebijakan publik model kelompok yang mengutamakan proses bottom-up dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat akan dapat terwujud adanya kontrol masyarakat, kepemimpinan sektor publik, hubungan yang efektif, peningkatan hasil, dan akuntabilitas dalam suatu proses kebijakan publik. Sebaliknya pemberdayaan masyarakat juga dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan, *'feelings of power and control,'* *sense of belonging and trust* dalam suatu proses kebijakan publik. Namun demikian upaya pemberdayaan dalam prakteknya tidak mudah, terutama kalau itu terjadi dalam wilayah teritorial pedesaan. Oleh karena itu perlu ada terobosan dengan menghadirkan inovasi dalam pembangunan di wilayah pedesaan yang dielaborasi pada Bab VI. Bab ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi. Hadirnya program inovasi desa bertujuan untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Inovasi dalam program pemberdayaan masyarakat sangat penting, namun karena keterbatasan sumber daya di pedesaan, menjadikan tidak mudah untuk merealisasikannya. Apa lagi setelah memasuki era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*), maka inovasi menjadi suatu keniscayaan dalam implementasi pemberdayaan. Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan yang terbawah dalam struktur

pemerintahan NKRI perlu menyusun strategi agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Bahasan ini dielaborasi secara luas dalam Bab VII. Penulis mengajukan beberapa alternatif strategi untuk menghadapi era tersebut. Alternatif pilihan strategi tersebut meliputi: (1) pemerintahan desa harus menyusun dan menetapkan visi secara jelas dan dapat dipahami oleh seluruh penyelenggara pemerintahan dan masyarakat desa. Pemahaman visi sangat penting, karena akan menimbulkan komitmen bersama dalam mencapai visi tersebut; (2) pendekatan yang dapat digunakan dalam rangka pencapaian visi adalah pendekatan agile dan inovatif; (3) *agile* dan inovatif membutuhkan partisipasi dan kerjasama stakeholders, oleh karena itu kolaborasi adalah strategi yang tepat menghadapi VUCA; dan (4) Investasi sumber daya manusia guna mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan digital dan perilaku yang fleksibel. Seiring dengan era tersebut, yang diakselerasi oleh hadirnya pandemi covid 19, maka pemerintah desa harus mulai berbenah dan segera beradaptasi dalam tata kelola pemerintahannya, terutama dalam pelayanan publik. Bab XIII mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana strategi perubahan dalam pelayanan publik yang mesti dilakukan oleh pemerintah desa, melalui pelayanan publik model *hybrid*. Namun demikian, adaptasi ke arah sana penuh dengan tantangan. Tantangan digitalisasi pelayanan publik di desa antara lain,

penyempurnaan infrastruktur, peningkatan sumber daya perangkat desa, perubahan sistem pelayanan, rendahnya sumber daya manusia masyarakat desa, serta rintangan budaya. Adapun peluang kebijakan untuk digitalisasi pelayanan publik di desa adalah peningkatan literasi masyarakat desa, peningkatan kualitas infrastruktur internet desa, desain pelayanan publik *hybrid*. Kapasitas birokrasi dalam penggunaan internet, dan dunia digital menjadi kapasitas unik, relevan dan mendesak untuk ditingkatkan.

Bab IX membahas tentang strategi peningkatan partisipasi publik dalam musyawarah pembangunan desa. Terdapat beberapa faktor mengapa masyarakat terlihat kurang peduli dengan pembangunan di desanya. Penulis menjelaskan tentang faktor-faktor pelemah partisipasi masyarakat desa antara lain: 1) Substansi perencanaan yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat sehingga memancing reaksi masyarakat; 2) Kurangnya sosialisasi, dan 3) Kesadaran politik masyarakat yang rendah karena tingkat pendidikan atau karena prioritas hidup sebagian besar masyarakat yang lebih tersita untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan strategi yang dipandang efektif untuk mendorong masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan pembangunan desa adalah: 1) Mempersatukan kekuatan masyarakat terutama para stakeholders; 2) Memberdayakan masyarakat (membangun kesadaran kritis masyarakat); 3) Publikasi hasil-hasil investigasi atau riset-riset yang penting; 4)

Berupaya mempengaruhi pengambil kebijakan ; dan 5) Memunculkan aksi dan gerakan secara kontinu.

Bab X Membahas tentang kepemimpinan kewirausahaan (*entrepreneurial leadership*) dan pemanfaatan dana desa Era *Post-Covid-19*. Bab ini menggambarkan tantangan berat bagi para manajer sektor publik terutama di desa, salah satunya berkenaan dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Setelah mengalami keterpurukan selama kurang lebih 2 tahun, saat ini merupakan fase dimana inovasi dan kegesitan seorang pemimpin harus ditunjukkan untuk membantu masyarakat agar segera pulih dari krisis. Untuk mempercepat proses pemullihan diperlukan pemikiran yang kritis dan inovatif dari seorang kepala desa untuk melaksanakan program dan kegiatan memberi dampak langsung pada ekonomi masyarakat desa. Gagasan tentang kepemimpinan yang memiliki mindset dan perilaku dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa mengarah pada perlunya mengembangkan semangat dan jiwa serta perilaku kewirausahaan yang harus dimiliki kepala desa. Perubahan harus dilakukan oleh kepala desa, dari yang konvensional menjadi kepala desa yang memiliki mindset dan perilaku kewirausahaan. Kepala desa dituntut untuk mampu mengalokasikan dana desa untuk kebutuhan program pemulihan ekonomi masyarakat desa melalui perencanaan bisnis yang efektif dan efisien dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain Program pemlihan Ekonomi,

Kepala desa juga harus mampu untuk dapat membagi Sumber daya untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dibidang lain, yaitu Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Tulisan Bab XI mengkaji tentang fenomena perkawinan anak di masa pandemi Covid-19 dan kebijakan penanganannya serta sejauh mana peluang Dana Desa untuk mengatasinya. Dana desa merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam membangun desa yang salah satu alokasinya adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Tulisan pada Bab XII melengkapi kajian tentang masalah gender, yang lebih menfokuskan pada upaya untuk mewujudkan desa ramah perempuan melalui kebijakan sosial berbasis gender. Desa ramah perempuan merupakan indikator realisasi pembangunan yang tidak hanya dibidang ekonomi, tetapi juga ruang untuk pencapaian keadilan dalam pembangunan. Selama ini pembangunan belum dinikmati oleh semua pihak, perempuan desa seringkali menjadi obyek pembangunan. Kesehatan perempuan belum menjadi prioritas penting, ekonomi dan pendidikan masih kurang berkembang. Penggunaan dana desa belum menyentuh kepentingan perempuan dan oleh karena itu pentingnya kebijakan sosial untuk memberikan kesadaran bersama bahwa pembangunan pedesaan yang ramah perempuan adalah prioritas. Oleh Karena itu, kesadaran para perumus kebijakan di tingkat desa menjadi kunci kebijakan sosial pro-gender, terutama

dalam pengalokasian anggaran yang berpihak pada perempuan dan anak.

Selanjutnya Bab XIII membahas tentang pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan di gampong-gampong (desa) yang ada di Aceh, dai masa Covid-19., melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). baik langsung maupun tidak, telah menjadi wadah komunitas para perempuan atau ibu-ibu rumah tangga untuk sama-sama menggali potensi desa dan diri dalam menggiatkan ekonomi kreatif. Kegiatan PKK yang dilakukan masyarakat Aceh telah terwujud dan aktif melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomis dan berwujud ekonomi kreatif. Keseriusan pemerintah dalam implementasi PKK terlihat dari peluncuran program kerja sama dengan kementerian sosial dan juga Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Dinas Sosial Provinsi Aceh. Dalam tulisan tersebut juga dibahas mengenai keterbatasan modal untuk pelaksanaan usaha. Oleh karena itu perlu ada Usaha yang serius dari pemerintah desa dengan mengalokasikan bantuan permodalan dari dana desa untuk mendukung permodalan home industry kerajinan kelompok PKK

Pada Bab XIV mengangkat masalah ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat. Kondisi Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah namun ternyata tidak berkorelasi terhadap pembangunan di sektor pertanian. Oleh Karena itu pentingnya mengelola sektor

pertanian dengan maksimal untuk menciptakan ketahanan pangan, melalui komitmen politik dan kebijakan yang keberlanjutan dan adaptif dalam sektor pertanian. Dari Hasil risetnya, penulis mencoba untuk memetakan tentang model pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan dalam menciptakan ketahanan pangan. *Pertama*, melalui model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas; *Kedua*, model pemberdayaan masyarakat melalui diversifikasi inovasi pangan lokal; *Ketiga*, pemberdayaan masyarakat melalui transfer teknologi pertanian; *Keempat*, pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi lahan perkarangan dan budidaya lainnya untuk menciptakan ketahanan pangan; *Kelima*, pemberdayaan masyarakat melalui kearifan lokal; dan *Keenam*, pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga pemberdayaan masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Selanjutnya Bab XV merupakan tulisan yang membahas tentang pemberdayaan budaya lokal Banyumas ‘cablaka’ yang mencerminkan kearifan lokal menjaga nilai-nilai dan perilaku sosial masyarakat. Budaya ‘cablaka’ mengandung nilai egaliter, bebas, dan blakasuta, yaitu sikap terbuka untuk menerima budaya, tatanan, pandangan, dan ideologi yang berasal dari di manapun. Sifat budaya yang egaliter tersebut dapat dijadikan sebagai media untuk menjembatani teori hybrid dalam implementasi kebijakan publik. Budaya tersebut disandingkan dengan model pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

Kuttab Al Fatih, yang sistem dan penyelenggaraan proses pendidikan dianggapnya kurang sesuai dengan budaya masyarakat Banyumas. Dengan kondisi yang demikian, tentunya bagaimana sikap para pengambil kebijakan terkait dengan permasalahan tersebut.

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	iii
Pengantar Editor	iv
Daftar Isi.....	xv
BAB I DISKURSUS PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN.....	1
<i>Muslih Faozanudin dan Lilis Sri Sulistiani</i>	
A. Diskursus Pemberdayaan dan Perkembangannya.....	2
B. Pemberdayaan dan Pembangunan	11
BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI PILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN	27
<i>Bambang Tri Harsanto</i>	
A. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Paradigma pembangunan	27
B. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	30
C. Aktor Pemberdayaan Masyarakat.....	32
D. Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	33
E. Teori Pemberdayaan.....	36
F. Metode Pemberdayaan Masyarakat.....	44
G. Indikator Pemberdayaan Masyarakat	45
H. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat.....	47
BAB III DINAMIKA SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN PENDEKATAN SYSTEMS THINKING.....	64

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

Ike Wanusmawatie

- A. Pemberdayaan, Kemandirian dan Pembangunan Masyarakat64
- B. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Administrasi Publik71
- C. Pendekatan Berpikir Sistem (*Systems Thinking*)75
- D. Sistem Pembentuk Kinerja Sistem Pemerintahan Desa80

BAB IV REKONSEPTUALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: TIDAK HARUS VERTIKAL DAN EKSTERNAL 104

Sukarso, Niken Paramarti Dasuki

- A. Konsep pemberdayaan dan Pembangunan104
- B. Program-Program Pemberdayaan106
- C. Plus-Minus Program-Program Pemberdayaan.....109
- D. Peluang Rekonseptualisasi111
- E. Keberhasilan - Kegagalan Program Pemberdayaan 112
- F. Rekonseptualisasi Program Pemberdayaan.....116
- G. Model Pemberdayaan Mandiri.....119
- H. Pemberdayaan Tanpa Subyek dan Oyek Eksternal122
- I. Kewajiban Administrasi Publik Untuk Pemberdayaan123

BAB V PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 126

Shadu Satwika Wijaya

- A. Proses Kebijakan Publik128

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

- B. Pemberdayaan Masyarakat 130
- C. Proses Kebijakan Publik Dan Pemberdayaan
Masyarakat 132

**BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
INOVASI DI PEDESAAN 143**

Hikmah Nuraini

- A. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi
Desa..... 143
- B. Strategi Inovasi Desa..... 147
- C. Model Inovasi Desa..... 152
- D. Pemberdayaan Desa Di Desa Sidowayah Kecamatan
Polanharjo Klaten 156

**BAB VII TANTANGAN DAN STRATEGI PEMERINTAHAN
DESA DI ERA VUCA 166**

Wahyuningrat

- A. Konsep VUCA..... 168
- B. Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Teoritis dan
Normatif..... 172
- C. Tantangan Dan Strategi Pemerintahan Desa Di Era
Vuca 179

**BAB VIII DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI DESA:
TANTANGAN DAN PELUANG KEBIJAKAN..... 194**

Dwiyanto Indiahono

- A. Urgensitas Digitalisasi Pelayanan Publik di
Desa..... 194
- B. Tantangan Digitalisasi Pelayanan Publik
Desa..... 199

C. Peluang Kebijakan.....	204
BAB IX STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA.....	213
<i>Simin, Guntur Gunarto, Andi Antono, Sendi Noviko</i>	
A. Problematika Partisipasi Masyarakat Desa.....	213
B. Perencanaan Kolaboratif	217
C. Strategi Menjaring Partisipasi Masyarakat Desa	224
D. Kendala-Kendala Melibatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa ..	226
E. Proses Pelaksanaan MUSRENBANGDES	228
F. Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Desa	231
BAB X ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP DALAM PEMANFAATAN DANA DESA ERA POST COVID19.....	240
<i>Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko</i>	
A. Mengapa Perlu ‘Entrepreneurial Ledership’	240
B. Kepemimpinan Publik.....	244
C. Kepemimpinan Publik Era Post Covid-19.....	250
D. <i>Entrepreneurial Culture Organization and Leadership.....</i>	<i>257</i>
E. Kepala Desa dan Urgensi ‘ <i>Entrepreneurial Leadership</i> ’	<i>266</i>
BAB XI OPTIMALISASI DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN KELUARGA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK MENUJU DESA RAMAH PERUMPUNAN DAN PEDULI ANAK	284

Dyah Retna Puspita

- A. Mengapa Perlu Mencegah Perkawinan Anak? 284
- B. Perkawinan Anak dalam Perpektif Undang-Undang Perkawinan 288
- C. Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat 290
- D. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak..... 292
- E. Makna Pemberdayaan Keluarga 295
- F. Penyuluhan Sebagai Bentuk Pemberdayaan 298
- G. Fenomena Perkawinan Anak di Masa Pandemi di Jawa Tengah 300
- H. Upaya mengoptimalkan Dana Desa untuk Pemberdayaan Pencegahan Perkawinan Anak menuju DRPPA 304

BAB XII KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS GENDER DALAM MEWUJUDKAN DESA RAMAH

PEREMPUAN 320

Tobirin

- A. Pembangunan Desa Yang Ramah Perempuan 320
- B. Kewenangan Desa dan Pembangunan Pedesaan..... 325
- C. Kebijakan Sosial Dalam Mewujudkan Desa Ramah Perempuan 331
- D. Prasyarat Desa Ramah Perempuan..... 331

BAB XIII IMPLEMENTASI PROGRAM KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI HOME INDUSTRY DI KOTA LHOKSEUMAWE 337

Safrida, Slamet Rosyadi, Nila Safrida

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

- A. Pemberdayaa Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)337
- B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik341
- C. Apa itu Pemberdayaan?347
- D. Pengertian Home Industry350
- E. Implementasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kerajinan Bordir di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe353

BAB XIV KETAHANAN PANGAN MELALUI KONSEP

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT372

Delly Maulana.

- A. Konsep Ketahanan Pangan375
- B. Pemberdayaan Masyarakat dan Rekayasa Sosial376
- C. Gambaran Ketahanan Pangan di Indonesia378
- D. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Untuk Menciptakan Ketahanan Pangan382

**BAB XV PEMBERDAYAAN KEARIFAN LOKAL ”CABLAKA”
SEBAGAI BAGIAN TEORI HYBRID DALAM**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK389

*Abdul Rohman, Darmanto Sahat Manurung, Mulyani Mudis
Taruna*

- A. Pengertian Kebijakan Publik dan Penerapannya392
- B. Mengenal Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kuttab Al Fatih397

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dialektika Partisipasi Publik dan Pembangunan

C.	Pemberdayaan Kearifan Lokal "Cablaka"	399
D.	Kearifan Lokal "Cablaka" Dalam Pandangan Teori Hybrid.....	403
TENTANG PENULIS.....		414

BAB XII

KEBIJAKAN SOSIAL BERBASIS GENDER DALAM MEWUJUDKAN DESA RAMAH PEREMPUAN

Tobirin

A. Pembangunan Desa Yang Ramah Perempuan

Perempuan merupakan potensi dan aset desa yang memiliki peranan dalam peningkatan kesejahteraan umum. Pemerintah desa perlu memberikan perhatian serius untuk pembangunan desa melalui pelibatan secara langsung maupun tidak langsung perempuan desa dalam proses pembangunan desa. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya perempuan desa sangat mungkin dilakukan melalui berbagai kegiatan guna mewujudkan kemandirian perempuan secara ekonomi, sosial, politik dan psikologis. Hal ini memiliki arti strategis mengingat perempuan adalah subyek sekaligus obyek dalam pembangunan di pedesaan. Pelibatan perempuan dalam pembangunan desa dapat dilakukan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi kebijakan pembangunan desa (Rosdiana, 2015: 122).

Pentingnya perempuan dalam pembangunan menjadi wajah baru dalam proses pembangunan yang mengedepankan sisi kemanusiaan dan rasa keadilan. Hal ini seiring dengan kondisi global dimana perempuan tampil berbeda dengan wajah baru perempuan yang memiliki identitas dengan mobilitas dan kesuksesan profesional di tengah realitas posisi perempuan yang ter subordinasi dan terdiskriminasi dalam menjalankan peran gendernya. Artikel dari Singh (2014: 59-62) tentang *status of women in today's society* disebutkan faktor-faktor yang menentukan peningkatan status perempuan dalam masyarakat modern dianalisis dalam aspek regulasi, pendidikan, ekonomi dan sektor pekerjaan, kesadaran dan partisipasi politik, kesadaran akan hak-hak perempuan. Di bidang pendidikan menjadi faktor dominan dalam peningkatan peran perempuan, di bidang ini perempuan mewakili tiga perempat 75,6 persen dari 493.440 karyawan dengan pendidikan tinggi, perempuan mewakili seperempat 25,5 persen karyawan dengan pendidikan tinggi, perempuan lebih dari setengah 56,5 persen dari guru perempuan di sekolah umum yang bekerja pada sekolah anak usia dini dan sekolah dasar.

Realita tentang arti strategis dan wajah peran gender perempuan yang semakin dinamis di tingkat global menjadi hal penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang ramah perempuan. Mengingat desa adalah wilayah yang paling mendasar dan menjadi acuan dalam mengukur

keberhasilan pembangunan dari aspek pemerataan dan keadilan bersama. Adil dalam arti menyentuh pada semua kepentingan baik perempuan ataupun laki-laki. Namun demikian tidak bisa dipungkiri desa dan perempuan masih di hadapkan pada berbagai permasalahan yang krusial. Salah satunya adalah stigma peran perempuan dalam pembangunan. Seperti yang diungkapkan dalam kajian (Putri, et all, 2017: 185) perempuan dapat berperan dalam pengembangan masyarakat desa, tetapi tidak fokus karena stigma perempuan sebagai pekerja domestik dibandingkan dalam menjalankan peran publiknya. Dalam hal inilah terjadi sebuah dilemma di masyarakat akan kedudukan perempuan dalam kegiatan bermasyarakat. Kajian yang senada disampaikan oleh (Indah, 2013) Perempuan lebih terlihat pada fisiknya yang kemudian berpengaruh pada kedudukannya di tengah masyarakat, dari kedudukan tersebut terakumulasi pada status perempuan yang dalam budaya patriarki menempatkannya sebagai “makhluk manusia kedua”.

Sesuai dengan kajian sebelumnya, perempuan desa menjadi asset penting dari pembangunan desa, sisi lain perempuan masih dihadapkan pada permasalahan dalam berbagai aspek, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Untuk itu diperlukan pembangunan desa yang mengarah pada perwujudan masyarakat yang sejahtera dan dapat dinikmati oleh siapa saja tanpa meniadakan elemen lainnya termasuk perempuan. Oleh karena itu desa perlu membangun layanan

publik, kebijakan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial yang berpihak pada aspek keadilan dan kesetaraan gender. Pembangunan di Banyumas masih dihadapkan pada tingginya angka kematian ibu, tingginya perceraian dan kekerasan terhadap anak masih menjadi keprihatian bersama, pernikahan dini.

Mengingat hal tersebut menjadi ketertarikan peneliti untuk menganalisis lebih jauh tentang permasalahan pembangunan desa dalam mewujudkan desa ramah perempuan. Sejauhmana pembangunan desa ramah perempuan mampu menjadi *grand desain* pembangunan pedesaan yang berkomitmen terhadap kesetaraan gender dan berpihak pada perempuan.

Urgensi pembangunan desa ramah perempuan melalui kebijakan sosial berbasis gender di desa pinggiran perkotaan diharapkan menjadi jawaban permasalahan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan pedesaan. Perempuan dan pembangunan pedesaan masih dihadapkan pada masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Prioritas dan kesempatan pendidikan masih minim, dibidang kesehatan lebih sekedar obyek program pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat desa, demikian pula dibidang ekonomi perempuan dianggap sebagai pelengkap dalam mencari nafkah. Sisi lain perempuan dalam kesempatan dan aksesibilitas untuk berpartisipasi pada pembangunan pedesaan masih terbatas. Selain itu aspek anggaran melalui

dana desa masih mengutamakan pembangunan fisik. Permasalahan pembangunan pedesaan yang belum terselesaikan terutama pembangunan pedesaan ramah perempuan perlu dirumuskan dengan keterlibatan berbagai pihak melalui advokasi kebijakan. Proses penyadaran untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan perempuan desa.

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan model pembangunan desa ramah perempuan melalui kebijakan sosial berbasis gender. Maka dalam peneulisan ini selain menganalisis hasil penelitian sebelumnya juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari surat kabar harian local maupun jurnal dan buku literatur yang mendiskusikan tentang desa ramah perempuan

Setting dari tulisan ini adalah desa pinggiran perkotaan yang berkembang pesat di Kabupaten Banyumas, yaitu Desa Sokaraja Lor dan Tambaksogra. Selain itu tulisan ini merangkum berbagai pendapat dari Kepala Desa Sokaraja Lor Dan Desa Tambaksogra, Badan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas, Camat Di Kecamatan Sokaraja dan Sumbang. Selain itu adalah kepala desa, BPD, Tokoh masyarakat dan tokoh agama.

B. Kewenangan Desa dan Pembangunan Pedesaan

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan hukum yang mempunyai pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kestuan Republik Indonesia. Desa mempunyai hak, kewajiban dan wewenang dalam menjalankan Pemerintahan Desa yaitu mengatur rumah tangganya sendiri sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama dalam bidang pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Sebagai realisasi dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan tentang wewenang desa dalam bingkai otonomi desa berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan desa.

Dalam pembangunan desa seringkali dijumpai permasalahan antara lain : 1) Kemampuan Personil aparat Pemerintah Desa yang masih terbatas; 2) Kemampuan pemenuhan kebutuhan yang sangat terbatas terutama dalam hal pendanaan;3) Masih banyaknya sarana dan prasarana pemerintah serta jalan, irigasi dan listrik maupun tempat pelayanan masyarakat yang masih belum memenuhi syarat.

Berbagai permasalahan tersebut sebenarnya bersumber pada masalah kewenangan desa yang semakin kompleks. Salah

sumber permasalahan berkaitan dengan kewenangan desa yang terbatas seiring dengan desa dengan anggaran desa yang besar. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Porio (2012,7-12) tentang *Decentralisation, Power and Networked Governance Practices in Metro Manila* menyebutkan bahwa desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk memulai struktur yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Studi ini menjelaskan bagaimana desentralisasi menghendaki pemerintah daerah dan aparatur daerah melakukan tindakan strategis dalam persaingan ekonomi, tata kelola sosial dan lingkungan, dengan melakukan konfigurasi ulang dan membentuk kembali struktur kekuasaan melalui proses demokratisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi melalui proses demokrasi menjadi basis masyarakat sipil, elit kekuasaan dan sektor bisnis menjalin *networking* dalam pembangunan masyarakat.

Kakumba (2010,-171-186) dalam kajian *Local government citizen participation and rural development: reflections on Uganda's decentralization system* menjelaskan tentang sistem desentralisasi pemerintahan lokal di Uganda dan mengevaluasi mekanisme peran partisipatif dalam peningkatan proses pembangunan pedesaan. Penelitian ini juga mengkaji tentang pembangunan manusia dan pemberdayaan yang bermanfaat bagi masyarakat miskin pedesaan. Tujuan desentralisasi kurang terjelaskan dalam

pembangunan pedesaan terutama di negara yang didominasi pertanian seperti Uganda. Oleh karena di butuhkan partisipasi, penyegaran dari peran masyarakat lokal, mobilisasi sumber daya, yang menuntut akuntabilitas dari para pemimpin lokal, berpartisipasi dalam perencanaan, dan memilih pemimpin tanpa manipulasi dari pemerintah pusat dan elit lokal.

Kajian yang berbeda tentang desentralisasi dan proses otonomi yang dikemukakan oleh Ekern, (2011, 93-119) *The Production of Autonomy: Leadership and Community in Mayan Guatemala*. menyebutkan bahwa desentralisasi merupakan proses pemindahan beban pemerintah daerah dengan mengambil satu set tugas publik, dengan mempertahankan kohesi masyarakat serta otonomi politik. Dalam konteks ini pembangunan sebagai proses representasi politik multikultural menunjukkan otonomi yang didasarkan pada filosofi yang berbeda dengan kepemimpinan yang menghasilkan pemerintahan otonom.

Ssangko (2013) menyebutkan Kebijakan desentralisasi di Uganda yang bertujuan untuk meningkatkan demokrasi lokal, efektivitas, efisiensi dan pelayanan penting bagi masyarakat yang merata dan menyeluruh. Peningkatan pelayanan yang baik diharapkan dapat membuat dampak positif yang signifikan pada kualitas hidup masyarakat. Pada pelaksanaan desentralisasi tam transformasi ekonomi dan kehidupan yang lebih baik bagi mayoritas Uganda.

Du (2014) mengemukakan dalam penelitiannya tentang Sistem otonomi desa sebagai salah satu sistem politik dasar dan sistem kekuasaan di Cina. Masyarakat minoritas umumnya hidup di barat laut China yang di cirikahkan dengan ekonomi dan pendidikan relatif terbelakang dibandingkan dengan mereka yang berwenang tengah dan timur China dan sipil memiliki pengaruh besar pada akar rumput pedesaan demokrasi serta otonomi sosial, hal ini menyebabkan kesulitan untuk pengembangan demokrasi pedesaan dan otonomi sosial. Membantu daerah minoritas barat laut dalam mengatasi kesulitan pengembangan akar rumput demokrasi dan otonomi sosial, melaksanakan langkah-langkah efektif untuk benar mengarahkan pengembangan dan pengaruh otoritas sipil dan akhirnya mencapai pembangunan pedesaan sosialis baru memiliki makna besar dalam memastikan bahwa orang di sana tuan dari negara mereka.

Jacob, Benoy; Lipton, Becky; Hagens, Victoria; Reimer, Bill, (2008) penulis berpendapat bahwa otonomi hanya berharga dalam kaitannya dengan kapasitas sebuah wilayah untuk memanfaatkan kekuatan baru dan kapasitas pedesaan sangat berbeda dengan wilayah perkotaan. otonomi bersifat dinamis dan multidimensional oleh karenanya otonomi diperlukan untuk mengeksplere wialayah pedesaan. Penelitian ini difokuskan pada upaya reformasi administrasi tradisional dalam konteks pedesaan. penulis menemukan empat dimensi

kapasitas yang dapat mendukung perubahan otonomi daerah: perencanaan strategis, partisipasi warga dan dukungan, keahlian, dan akses ke pendapatan.

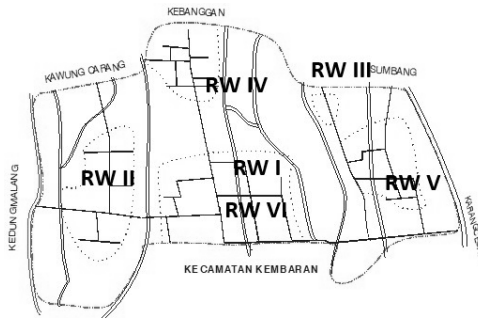
Dedeire, Marc and Maciulyte, Jurgita, (2012) kajiannya tentang pemahan pembangunan daerah di Lithuania, dikaitkan dengan warisan sosial, ekonomi dan teritorial tentang bagaimana daerah lokal berfungsi. Dihadapkan pada permasalahan kelembagaan dengan hilangnya pertanian kolektif. Lahirnya gerakan "masyarakat pedesaan" berhubungan kembali dengan sistem desa pra-Soviet, mengisyaratkan kembali pembangunan proyek, jaringan teritorial operasional. Selain itu adanya self-organized ini terutama difokuskan pada penguatan ikatan sosial antara penduduk masyarakat setempat; yang mengutamakan leadership.

Berbagai jurnal tersebut menjelaskan relasi kekuasaan yang terimplementasikan dalam desentralisasi wewenang akan memberikan ruang gerak bagi pemerintahan dibawahnya termasuk di tingkat desa berinisiasi mewujudkan kemandirian desa. Hal ini terwujud dalam pemerintahan yang efektif, efisien dan melayani dengan pelayanan yang baik. Ruang demokratis yang dibuka seiring dengan pelimpahan wewenang kepada desa akan mendorong langkah strategis desa dalam menjalankan fungsinya termasuk dalam peningkatan ekonomi dan pendapatan warga masyarakat oleh

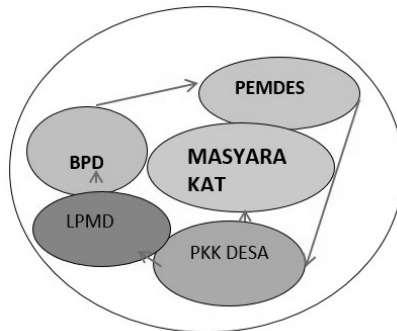
karena itu diperlukan strong leadership yang memahami masyarakat local.

Salah satu contoh gambaran urutan pelaksanaan kegiatan di Desa dalam pembangunan di Desa sebagai berikut:

1. Penggalian Masalah dan Potensi Melalui Sketsa Peta Desa:



2. Penggalian Masalah dan Potensi Melalui Sketsa Peta Desa:



C. Kebijakan Sosial Dalam Mewujudkan Desa Ramah Perempuan

Kebijakan sosial dalam Negara kesejahteraan sosial merupakan bentuk kebijakan layanan sosial, meliputi; 1) layanan dalam layanan kesehatan, kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, layanan ketenagakerjaan, perawatan masyarakat dan manajemen perumahan; 2) masalah sosial, termasuk kejahatan, kecacatan, pengangguran, kesehatan mental, ketidakmampuan belajar, dan usia tua; 3) masalah yang berkaitan dengan kerugian sosial, termasuk ras, jenis kelamin dan kemiskinan; dan 4) berbagai respons sosial kolektif terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat (Spicker, 2007: Rahimi & Noruzi, 2011).

Kebijakan sosial sebuah intervensi untuk perubahan, pemeliharaan atau penciptaan kondisi kehidupan yang kondusif bagi kesejahteraan manusia. Kebijakan sosial meliputi upaya dibidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan dan makanan untuk semua orang. Kebijakan sosial adalah bagian dari kebijakan yang berkaitan dengan masalah sosial (Hernández, Mohammad Reza Noruz & Farhad Nezhad Haj Ali Iran, 2011: 287).

D. Prasyarat Desa Ramah Perempuan

Menurut kementerian pemberdayaan dan perempuan dan perlindungan anak tentang isu strategis dalam kesetaraan dan pemberdayaan perempuan meliputi; kesetaraan gender

dan pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan; perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (tpo); peningkatan kapasitas kelembagaan pug dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Sedangkan isu strategis perlindungan anak meliputi, meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak; meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak.

Desa ramah perempuan merupakan sebuah konsep dimana pemerintah desa dan warga peduli terhadap nasib perempuan dan anak. Berbagai perspektif tentang desa ramah perempuan disampaikan oleh informan sebagai berikut:

Pada dasarnya untuk mencapai pembangunan yang baik harus melibatkan semua unsur termasuk peran perempuan. Maka dari itu perlu kiranya tingkat keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa terus dipantau dan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Termasuk keterlibatan perempuan di bidang politik desa perlu digerakkan. Jabatan-jabatan perangkat desa, BPD dan jabatan lain di desa seperti manager BUMDes, Manager koperasi Desa. Lebih lanjut lagi supaya nantinya dibuka lebih luas pula telibat

dalam musyawarah desa, musrenbangdes, dan forum-forum lainnya upaya mewujudkan pembangunan desa.

Berdasarkan jawaban tersebut sebenarnya yang ingin diungkap adalah desa ramah perempuan merupakan desa yang memiliki responsibilitas dan peduli terhadap nasib perempuan. Menyadari arti strategis dalam pembangunan desa. Oleh karena itu pemberian ruang publik pada perempuan tidak hanya bersifat afirmatif melainkan sebuah kebutuhan bahwa pembangunan desa dan perempuan memiliki korelasi yang positif dalam menggerakkan pembangunan di tingkat desa.

Selama ini perempuan memiliki arti strategis dalam pembangunan desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu kepala desa sebagai berikut;

Peran perempuan yang selama ini banyak dilakukan di bidang kesehatan, pendidikan dan budaya. Dalam hal kesehatan mereka berperan aktif dalam penyuluhan sederhana baik itu mengenai pemberantasan penyakit menular, posyandu, kemudian pengelolaan dana sehat, kegiatan tanaman obat keluarga (toga). Di pendidikan disini perempuan banyak terlibat dalam Penyelenggaranya pelatihan-pelatihan ketrampilan

dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).

Peran perempuan tidak dapat diragukan lagi dalam pembangunan desa. Namun demikian nasib perempuan masih subordinat sebagaimana relasi perempuan dan laki-laki dalam dimensi sosial. Akibatnya perempuan seringkali sebagai obyek yang tereksploitasi dalam pembangunan.

Pembangunan desa selama ini mengabaikan perempuan dengan lebih memprioritaskan pada pembangunan fisik dan kesejahteraan ekonomi. Melalui kebijakan social progender diharapkan adanya kesadaran baru pembangunan desa lebih berorientasi pada upaya dalam memberikan perlindungan pada perempuan dan anak (pendidikan, kesehatan, ekonomi), adanya jaminan semua anak memiliki akte kelahiran, semua anak bermain dengan nyaman terpenuhinya fasilitas bermain anak (taman kota dan lapangan bola).

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan sosial yang berbasis pada gender, partisipasi perempuan lebih terjamin dalam perencanaan sampai evaluasi dalam pembangunan desa. Selain itu kapasitas aparat pemerintah dan kelambagaan desa memberikan ruang untuk pembangunan yang tidak hanya berpihak pada perempuan tetapi mampu melibatkan perempuan dalam subyek pembangunan desa.

Daftar Pustaka

- Dedeire, Marc and Maciulyte, Jurgita, (2012) Rural communities, new stakeholders in *local development in Lithuania Revue d'Etudes Comparatives Est-uest*, ISSN 0338-0599, 09/2012, Volume 43, Issue 3, pp. 145 – 172
- Du, Junlin, (2014) Influence of Civil Authority on Rural Grass-roots Democracy and Social Autonomy in Northwest Minority Regions, *Asian Agricultural Research* 6.1 (Jan 2014): 75-79,83.
- Ekern, STENER (2011) The Production of Autonomy: Leadership and Community in Mayan Guatemala. *Journal of Latin American Studies*, 43.1 (Feb 2011): 93-119,
- Kaho, Josef, Riwu (2007) *Prospek Otonomi Daerah di Negara kesatuan Republik Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Kakumba, Umar, (2010) *Local government citizen participation and rural Development: reflections on Ugand decentralization system* International Review of Administrative Sciences, ISSN 0020-8523, 03/2010, Volume 76, Issue 1, pp. 171 – 186
- Kushandajani. (2006) Otonomi Desa dan Implikasi UU No 32 Tahun 2004 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Telah Normatif dan Sosiologis, *Jurnal Hukum dan*

Dinamika Masyarakat, Vol 1 No. 6 Hal 1-106, Untag Semarang.

Hernández, Mohammad Reza Noruz & Farhad Nezhad Haj Ali Iran. (2011). What is Policy, Social Policy and Social Policy Changing, *International Journal of Business and Social Science* Vol. 2 No. 10; June 2011

Jacob, Benoy; Lipton, Becky; Hagens, Victoria; Reimer, Bill. (2008). Re-thinking local autonomy: Perceptions from four rural municipalities. *Canadian Public Administration/Administration publique du Canada*, ISSN 0008-4840, 09/2008, Volume 51, Issue 3, pp. 407 - 427

Porio .(2012. *Decentralisation, Power and Networked Governance Practices* in Metro Manila, Space and Polity, Vol. 16, No. 1, 7–27, April 2012

Ssonko, David K.W. (2013). Decentralisation and Development: Can Uganda Now Pass the Test of Being a Role Model? *Commonwealth Journal of Local Governance*, Issue 13/14: November 2013
<http://epress.lib.uts.edu.au/ojs/index.php/cjlg>

Usman, Sunyoto. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka pelajar, Yogyakarta

Widjaya, HAW. (2005). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, PT Rajagrafindo, Jakarta